

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2014 dan Kondisi Kelistrikan Indonesia

**Aviliani
17 Januari 2014**

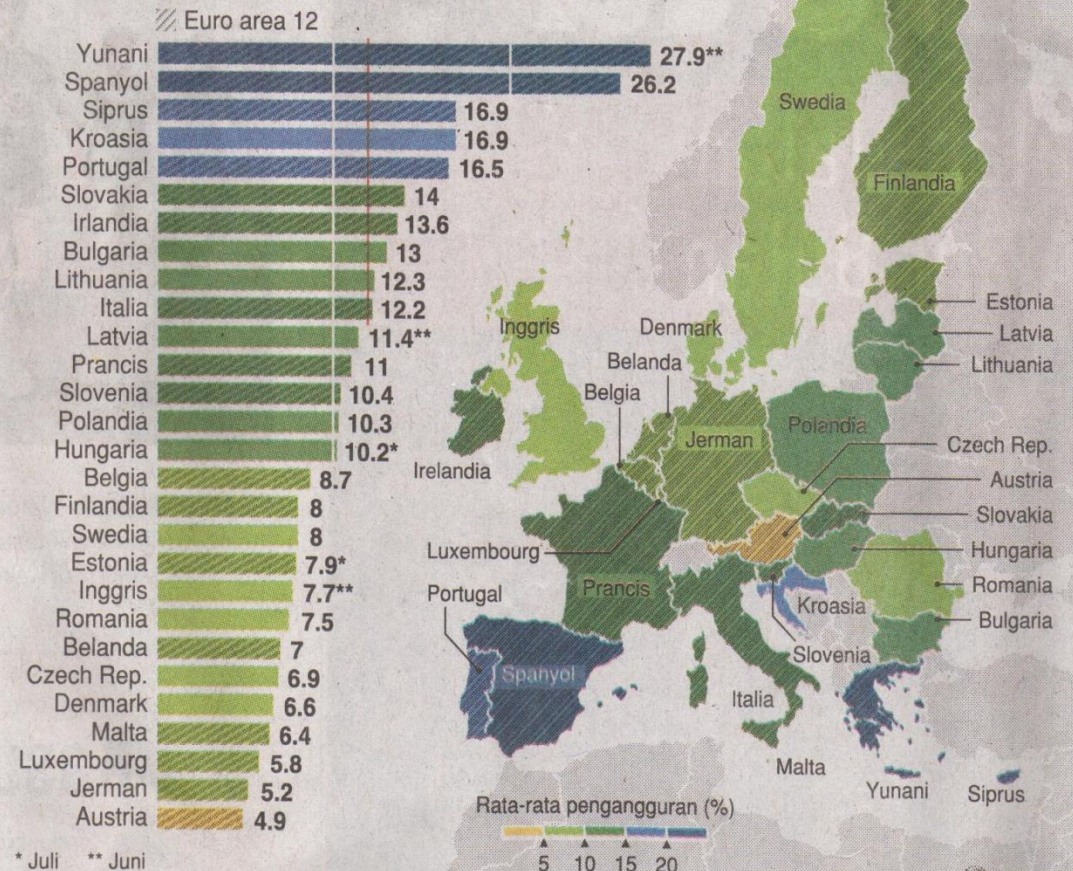
Outlook Ekonomi Global dan Pengangguran di Eropa

Perubahan PDB (%)

	2012	Proyeksi 2013	Proyeksi 2014
Dunia	3,2	2,9	3,6
Negara Maju	1,5	1,2	2,0
Amerika Serikat	2,8	1,6	2,6
Jepang	2,0	2,0	1,2
Zona Euro	-0,6	-0,4	1,0
Jerman	0,9	0,5	1,4
Prancis	0,0	0,2	1,0
Italia	-2,4	-1,8	0,7
Spanyol	-1,6	-1,3	0,2
Inggris	0,2	1,4	1,9
Kanada	1,7	1,6	2,2
Negara Berkembang	4,9	4,5	5,1
Eropa Tengah dan Pusat	1,4	2,3	2,7
Rusia	3,4	1,5	3,0
Asia	6,4	6,3	6,5
China	7,7	7,6	7,3
India	3,2	3,8	5,1
Amerika Latin dan Karibia	2,9	2,7	3,1
Brasil	0,9	2,5	2,5
Meksiko	3,6	1,2	3,0
Timur Tengah dan Afrika Utara	4,6	2,3	3,6
Sub-Sahara Afrika	4,9	5,0	6,0
Afrika Selatan	2,5	2,0	2,9

Pengangguran di Eropa

Rata-rata Agustus 2013 (%)



Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang di Asia Timur

Negara	2011	2012	Proyeksi			Perubahan dari April 2013 (%)	
			2013	2014	2015	2015	2014
Negara Berkembang di Asia Timur	8,3	7,5	7,1	7,2	7,2	-0,7	-0,4
China	9,3	7,8	7,5	7,7	7,5	-0,8	-0,3
Indonesia	6,5	6,2	5,6	5,3	5,8	-0,6	-1,2
Malaysia	5,1	5,6	4,3	4,8	4,8	-0,8	-0,6
Filipina	3,6	6,8	7,0	6,7	6,8	0,8	0,3
Thailand	0,1	6,5	4,0	4,5	5,0	-1,3	-0,5
Vietnam	6,2	5,2	5,3	5,4	5,4	0,1	-0,3
Kamboja	7,1	7,3	7,0	7,0	7,0	0,0	-0,2
Fiji	1,9	2,3	2,4	2,1	2,2	0,2	-0,2
Laos	8,0	8,2	8,0	7,7	8,1	0,4	0,0
Mongolia	17,5	12,4	12,5	10,3	10,0	-0,5	-1,2
Myanmar	5,9	6,5	6,8	6,9	6,9	0,3	0,3
Papua Nugini	10,7	8,7	4,5	10,0	20,0	0,5	2,5
Kep. Salomon	10,7	4,8	4,0	3,5	3,7	0,0	-0,5
Timor Leste	10,8	10,6	10,4	10,2	11,5	0,0	0,0

Menuju 2014: Analisa SWOT Indonesia

Strength

- Populasi Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa dengan tingkat pendapatan yang cenderung meningkat merupakan potensi pasar domestik yang sangat tinggi.
- Perekonomian Indonesia relatif stabil walaupun ditengah guncangan ekonomi global.
- Praktik demokrasi di Indonesia sudah relatif kondusif.
- Kinerja perbankan relatif solid. Bank-bank besar di Indonesia dinilai resilient terhadap guncangan ekonomi global.

Weakness

- Defisit transaksi berjalan diperkirakan akan berlanjut di 2014, akibat masih lemahnya ekspor dan tingginya impor, terutama impor migas.
- Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Isu ini berpotensi dipolitisir menjelang pemilu 2014 yang bisa memanaskan suasana.
- Ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap komoditas menyebabkan gejolak pada harga komoditas global berpengaruh signifikan pada kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi.

Opportunities

- Kegiatan pra-pemilu dan pemilu di 2014 diprediksi akan meningkatkan aktivitas ekonomi domestik. Menurut analisa berbagai ahli, pemilu berpotensi meningkatkan dana berputar di masyarakat hingga Rp.50 Triliun untuk berbagai kegiatan termasuk pengembangan infrastruktur. Pemilu diperkirakan akan menyumbang 0,2% bagi pertumbuhan ekonomi (Bank Indonesia).
- Tekanan inflasi di 2013 diperkirakan sudah mereda di 2014. Hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat.
- Dengan imbal hasil yang tinggi serta pasar yang besar, Indonesia masih dilihat sebagai tujuan investasi yang menarik di mata investor.
- Harga komoditas dunia diperkirakan akan berangsur semakin membaik di 2014.
- Terdapat potensi aliran dana masuk ke negara-negara berkembang bila stimulus keuangan Jepang berlanjut.

Threat

- Ketidakpastian menjelang pemilu tinggi. Hal ini akan mendorong investor untuk mengerem laju investasi, baik investasi langsung PMA/ PMDN, serta investasi portofolio (*wait and see*).
- Walaupun potensi terjadinya kerusuhan politik relatif rendah, namun potensi itu tetap ada.
- Potensi aliran dana keluar (*hot money capital outflow*) akibat *tapering off* stimulus keuangan AS tetap ada di 2014 (sekitar akhir kuartal I-2014).
- Meningkatnya harga berbagai komponen dasar industri (tarif dasar listrik, UMP/UMK) berpotensi melemahkan minat investasi ke Indonesia.

Perkembangan Perekonomian Indonesia dan Proyeksi 2014

	2008	2009	2010	2011	2012	2013:APBNP	2014 RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6	4,6	6,2	6,5	6,2	6,3	6,4
Inflasi (%)	11,1	2,8	7	3,8	4,3	7,2	4,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	9691	10408	9087	8779	9384	9600	9750
Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	9,3	7,6	6,6	4,8	3,2	5	5,5
Harga Minyak (USD/barel)	97	61,6	79,4	112	113	108	106
Lifting Minyak (Ribu barer/hari)	931	943,9	954	899	861	840	870
Lifting Gas (mboepd)	-	-				1240	1240

Sumber: Kementerian Keuangan, 2013

Pertumbuhan Ekonomi Penggunaan dan Sektoral

	2013	2014
Pertumbuhan Ekonomi	6,3	6,4
Penggunaan		
Konsumsi Masyarakat	5	5,3
Konsumsi Pemerintah	6,7	5,4
Investasi	6,98	8,8
Ekspor	6,6	7,4
Impor	6,1	7,5
Lapangan Usaha		
Pertanian	3,7	3,5
Pertambangan	2	1,5
IP	6,1	6,4
LGA	6,4	5,8
Konstruksi	7,3	6,8
Perdagangan	8,3	8,1
Pengangkutan dan Tel	11,1	10
Keuangan	6	6
Jasa-jasa	5,2	6,6

Sumber: Kementerian Keuangan, 2013

- Ekonomi nasional masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga ditengah-tengah lonjakan inflasi.
- Konsumsi pemerintah tidak bergerak banyak karena tersandera realisasinya
- Investasi akan cenderung melambat karena munculnya risiko-risiko di sektor eksternal maupun buruknya iklim investasi
- Ekspor sedikit membaik (terutama ke USA dan Eropa) yang diharapkan bergerak ke negara-negara lainnya terutama ASEAN, China, Jepang, dan India
- Impor masih tinggi namun berepotensi menurun jika nilai tukar tidak kunjung menguat.
- Dari lapangan usaha, pertumbuhan sektor *nontradable* masih mendominasi.

Ringkasan APBN 2013 dan RAPBN2014

		2013:APBN-P	RAPBN -2014	Perubahan (yoy)
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	1.502,0	1662,5	10,69
	I. Penerimaan Dalam Negeri	1.497,5	1161,1	(22,47)
	1. Penerimaan Perpajakan	1.148,4	1310,2	14,09
	2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	349,2	350,9	0,50
	II. Hibah	4,5	1,4	(68,78)
B.	Belanja Negara	1.726,2	1816,7	5,24
	I. Belanja Pemerintah Pusat	1.196,8	1230,3	2,80
	1. K/L	622,0	612,7	(1,50)
	2. Non K/L	574,8	617,7	7,46
	II. Transfer Ke Daerah	529,4	586,4	10,77
	1. Dana Perimbangan	445,5	481,8	8,14
	2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	83,8	104,6	24,77
C.	Keseimbangan Primer	(111,7)	(34,7)	(68,93)
D.	Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(224,2)	(154,2)	(31,22)
	% terhadap PDB	(2,38)	(1,49)	(37,39)
E.	Pembiayaan	224,2	154,2	(31,22)
	I. Pembiayaan Dalam Negeri	241,1	173,2	(28,15)
	II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	(16,9)	(19,00)	12,63
	Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	0,0	0	-

- a. Pendapatan negara ditetapkan Rp1.662,5 triliun. Penerimaan perpajakan masih mendominasi sekitar Rp1.310.2 triliun. Penerimaan perpanjangan internasional diperkirakan menurun karena perlambatan ekspor yang terus terjadi
- b. Belanja negara direncanakan Rp1.816,7 triliun sehingga defisit Rp154,2 triliun (1,49% dari PDB)

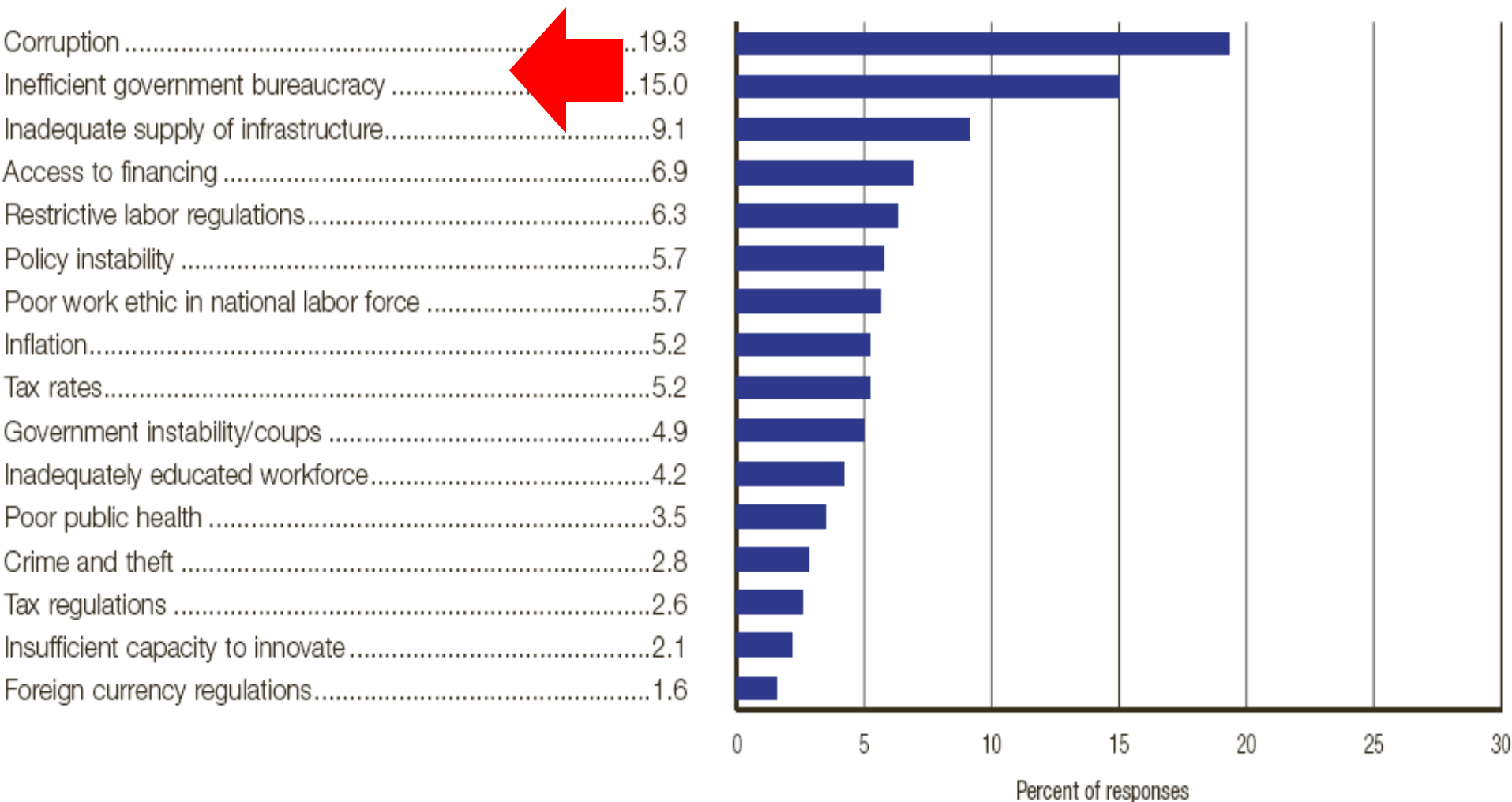
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat 2013-2014

	2013			2014			Pertumbuhan
	APBNP	% PDB	% Total	RAPBN	% PDB	% Total	(yoy)
Belanja Pegawai	233	2,5	19,47	276,7	2,7	22,49	18,76
Belanja Barang	206,5	2,2	17,25	203,7	2	16,56	-1,36
Belanja Modal	192,6	2	16,09	205,8	2	16,73	6,85
Pembayaran Bunga Utang	112,5	1,2	9,40	119,5	1,2	9,71	6,22
Subsidi	348,1	3,7	29,09	336,2	3,2	27,33	-3,42
Belanja Hibah	2,3	0	0,19	3,5	0	0,28	52,17
Bantuan Sosial	82,5	0,9	6,89	55,9	0,5	4,54	-32,24
Belanja Lain-lain	19,3	0,2	1,61	28,9	0,3	2,35	49,74
Total	1196,8	12,7		1230,2	11,9		2,790775401
Sumber: Kementerian Keuangan, 2013, telah diolah kembali							

Belanja pegawai justru naik lebih kencang pada RAPBN 2014 mencapai 18,76 persen. Belanja modal hanya naik 6,85 persen.

Perbaikan Daya Saing Indonesia

The most problematic factors for doing business



2. Kondisi Kelistrikan Indonesia

Peranan Sektor Energi terhadap Perekonomian

PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN

**PEMBANGUNAN
EKONOMI**

**SUMBER
PENDAPATAN
NEGARA**

**PENGERAK
PERTUMBUHAN**

**SUMBER ENERGI
DAN BAHAN
BAKU INDUSTRI**

**MENCIPTAKAN
EFEK BERANTAI**

**SEKTOR
ENERGI**

Pendekatan masa lalu :
Memaksimalkan pendapatan negara

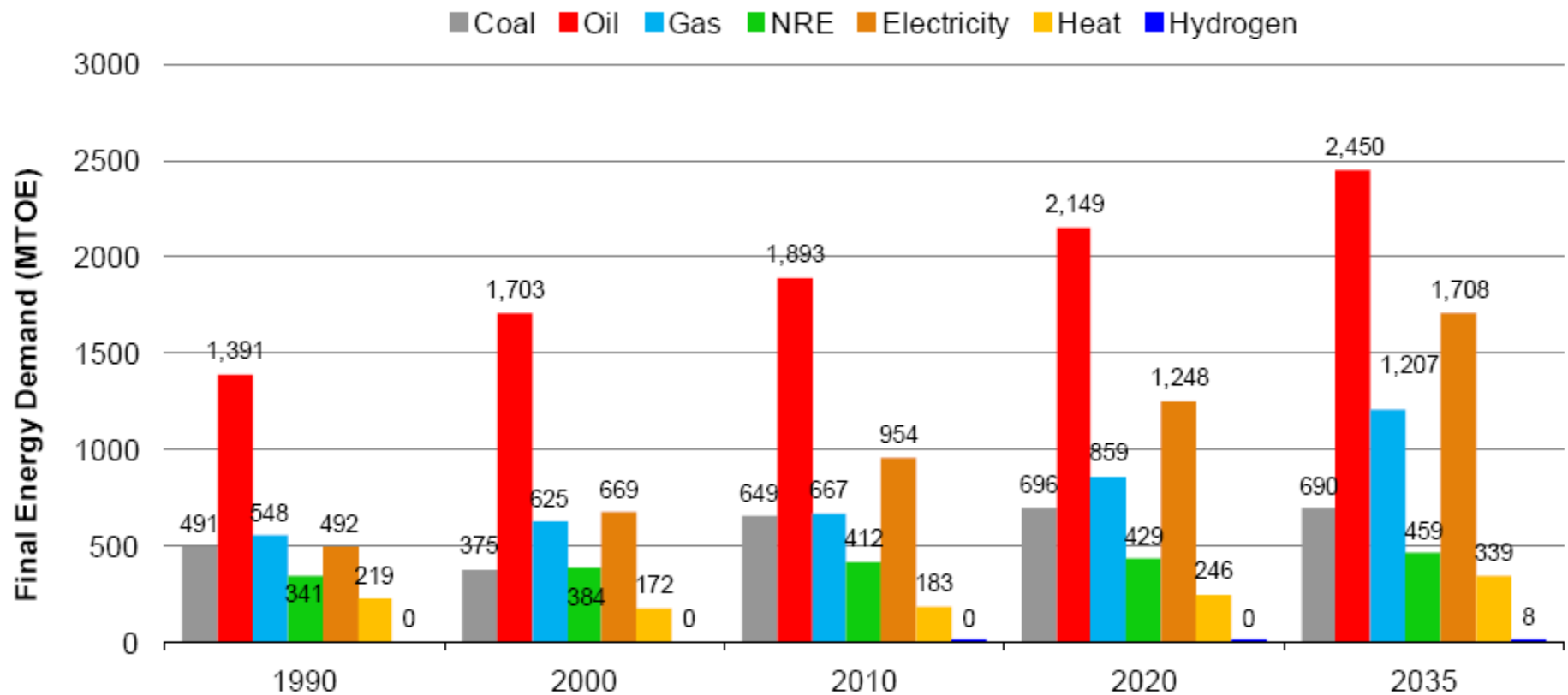
Pendekatan saat ini:
Kesejahteraan rakyat
11
(Pro Poor - Pro Job - Pro Growth)

Perkembangan PDB, Pertumbuhannya, dan PDB per Kapita

Economy	Total GDP (Billion USD PPP)			GDP Growth Rate (%)	GDP per Capita (USD PPP)		
	2010	2020	2035		2010	2020	2035
Australia	790	1 038	1 533	2.7%	35 460	41 103	52 755
Brunei Darussalam	18	22	28	1.7%	45 763	46 731	50 564
Canada	1 206	1 539	2 170	2.4%	35 383	40 543	49 320
Chile	233	375	724	4.6%	13 644	20 299	36 259
China	9 120	19 564	45 117	6.6%	6 802	14 099	32 415
Hong Kong, China	295	447	729	3.7%	41 818	59 667	86 727
Indonesia	931	1 603	3 341	5.2%	3 880	6 106	11 605
Japan	3 946	4 430	4 672	0.7%	30 807	35 539	40 044
Korea	1 321	1 885	2 727	2.9%	27 415	37 845	54 025
Malaysia	376	576	1 000	4.0%	13 244	17 450	25 325
Mexico	1 410	2 056	3 433	3.6%	12 427	16 326	24 515
New Zealand	110	142	203	2.5%	25 258	29 500	37 570
Papua New Guinea	15	27	45	4.4%	2 217	3 311	4 044
Peru	248	407	788	4.7%	8 417	11 945	20 956
Philippines	332	526	1 006	4.5%	3 561	4 792	7 443
Russian Federation	2 014	2 868	4 505	3.3%	14 348	20 336	33 617
Singapore	264	398	632	3.6%	51 801	71 057	102 588
Chinese Taipei	743	1 078	1 687	3.3%	32 249	47 598	70 611
Thailand	530	783	1 505	4.3%	7 674	10 864	20 392
United States	13 088	16 843	24 362	2.5%	42 157	49 305	62 389
Viet Nam	250	462	1 148	6.3%	2 845	4 803	11 055

Source: APERC Analysis (2012), based on data from Global Insight (2012) and USDA (2012)

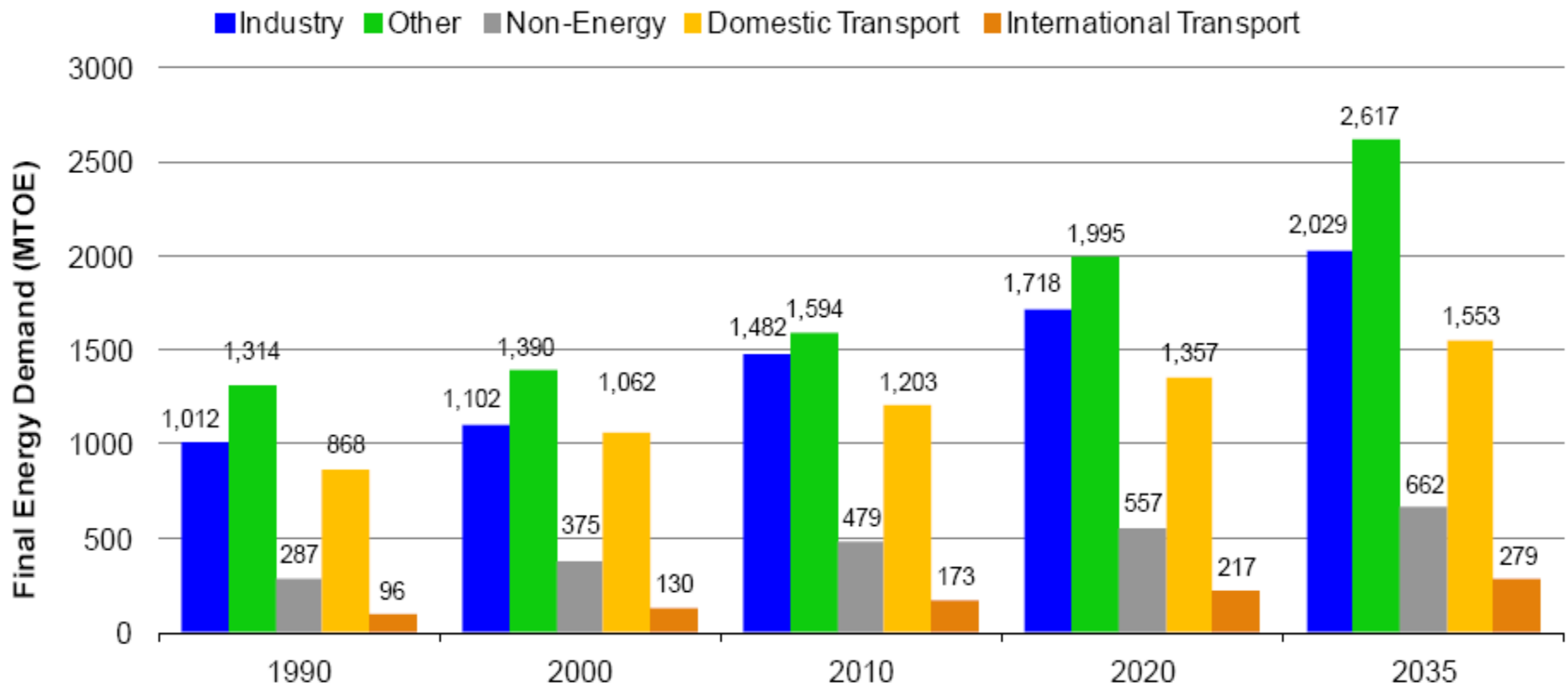
Konsumsi Energi Final Asia Pasifik



Source: APERC Analysis (2012)

- Sampai 2035, konsumsi energi final di Asia Pasifik diproyeksi masih didominasi oleh minyak (36 persen) disusul listrik (25 persen) dan gas (17 persen). Penggunaan batubara (10 persen) dan jenis lainnya masih sangat rendah.

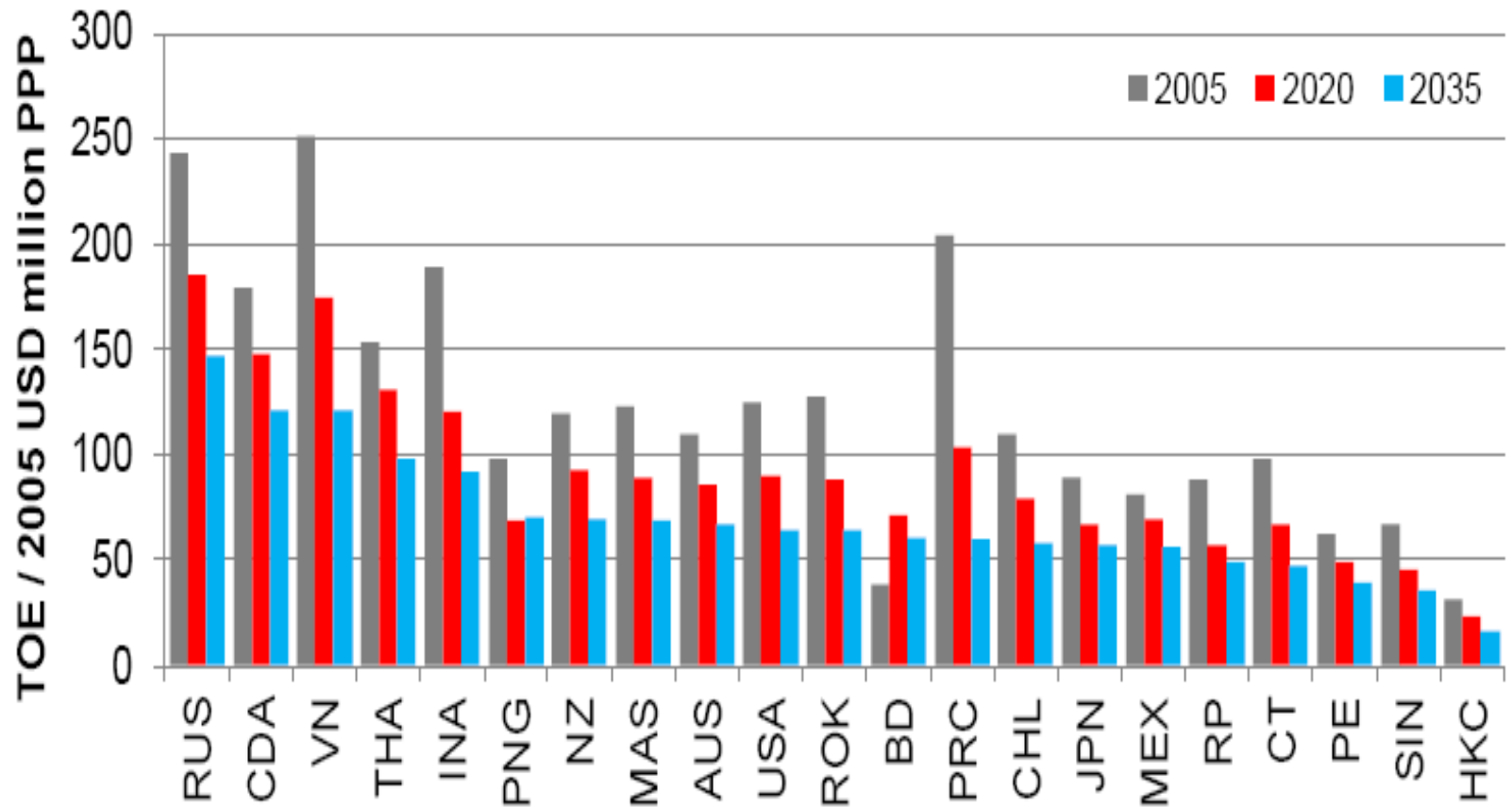
Konsumsi Energi Asia Pasifik Menurut Sektor



Source: APERC Analysis (2012)

- Pada 2035, sektor industri menjadi konsumen utama konsumsi energi Asia Pasifik disusul transportasi domestik. Format yang demikian tidak jauh berbeda dengan periode-periode sebelumnya.

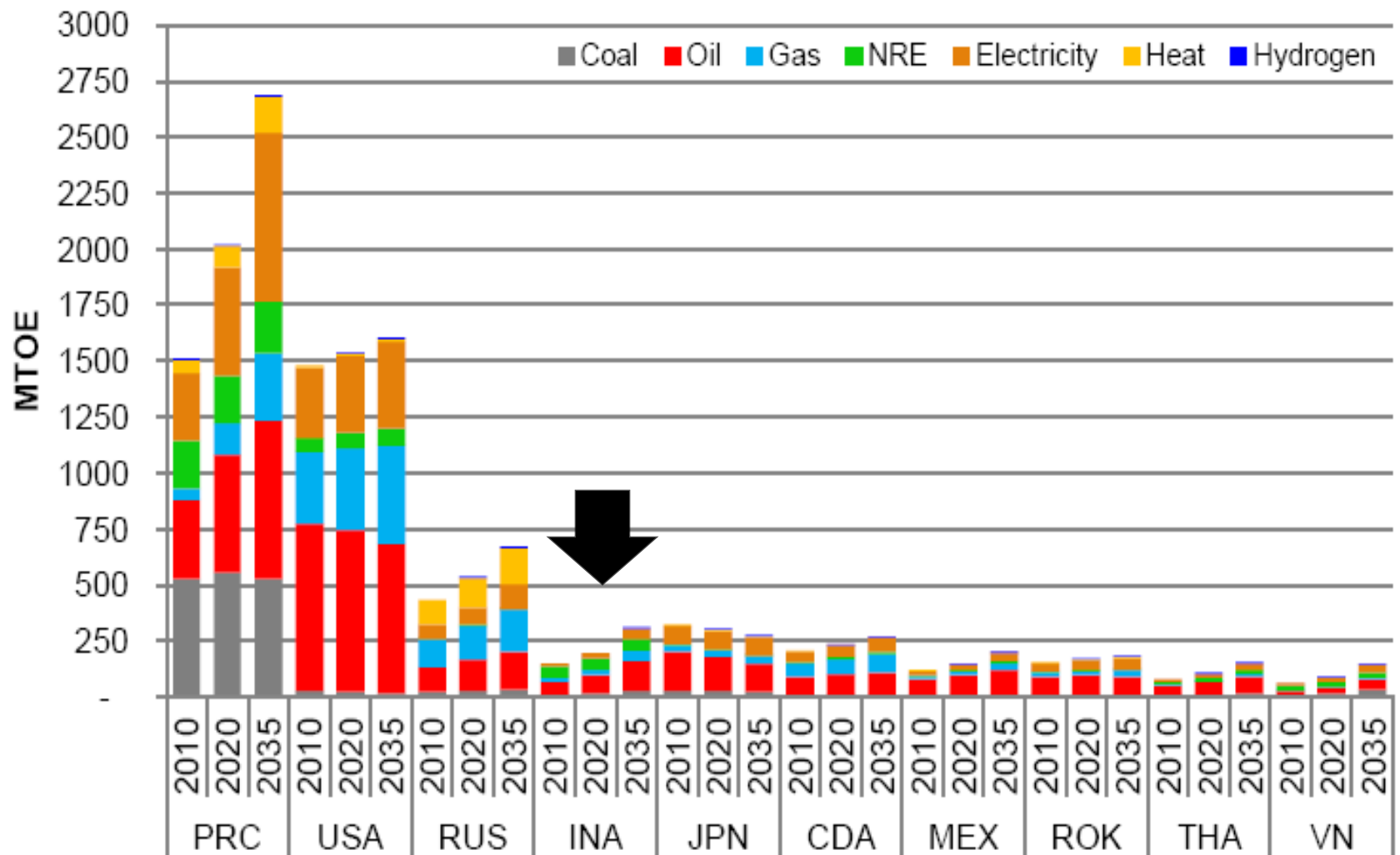
Intensitas Energi Menurut Individual Negara



Source: APERC Analysis (2012)

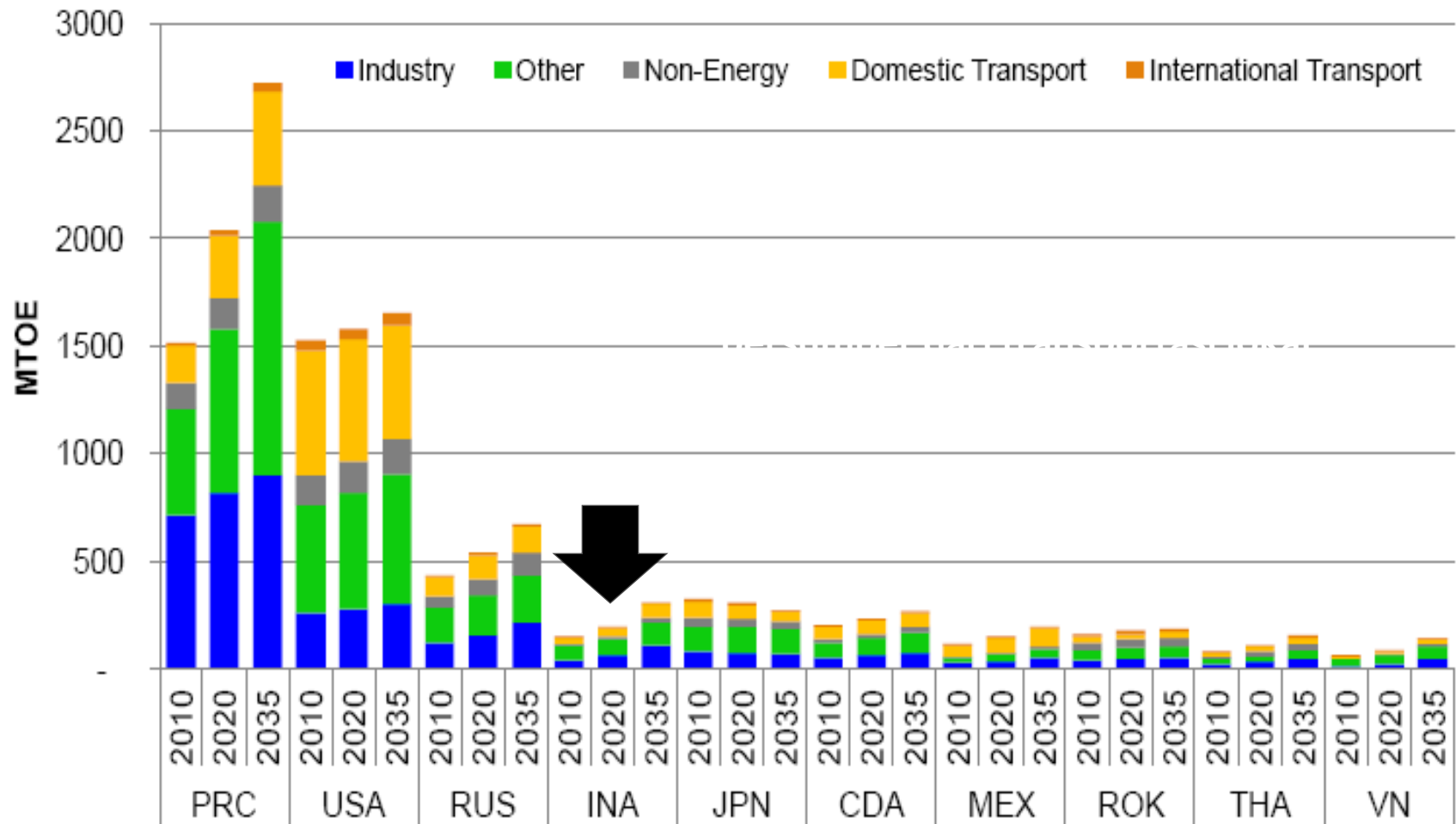
- Rusia, Canada, Venezuela mencapai peringkat tertinggi disusul Thailand dan Indonesia.

Struktur Konsumsi Energi Asia Pasifik Menurut Negara



Source: APERC Analysis (2012)

Permintaan Energi Menurut Sektor dan Individu Negara



Source: APERC Analysis (2012)

Jumlah Kendaraan per 100 Penduduk

Vehicle Ownership (per 1000ppl)	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2010-2020	2020-2035
Australia	627	662	691	705	725	746	769	792	0.5%	0.6%
Brunei Darussalam	408	452	544	603	640	662	676	684	1.6%	0.5%
Canada	543	570	591	621	645	663	677	689	0.9%	0.4%
Chile	132	150	178	212	260	311	359	399	3.8%	2.9%
China	13	24	58	114	167	223	280	343	11.1%	4.9%
Hong Kong, China	81	70	74	76	78	79	79	79	0.5%	0.2%
Indonesia 	25	42	77	85	109	148	205	272	3.4%	6.3%
Japan	574	594	581	580	581	583	585	587	0.0%	0.1%
Korea	260	324	357	375	389	398	405	410	0.9%	0.3%
Malaysia	225	292	358	420	475	520	556	582	2.9%	1.4%
Mexico	186	204	265	295	337	383	427	466	2.4%	2.2%
New Zealand	649	725	711	700	700	707	715	725	-0.2%	0.2%
Papua New Guinea			10	13	17	22	26	31	5.7%	4.0%
Peru	45	50	62	92	131	180	234	291	7.7%	5.4%
The Philippines	32	34	32	32	36	44	58	75	1.1%	5.1%
Russia	174	215	271	322	384	448	506	553	3.6%	2.5%
Singapore	127	144	156	157	157	158	158	158	0.1%	0.0%
Chinese Taipei	251	292	297	336	371	398	419	435	2.2%	1.1%
Thailand	122	146	171	218	286	368	456	535	5.3%	4.3%
United States	755	803	797	799	801	805	808	811	0.1%	0.1%
Viet Nam	7	11	16	24	39	66	114	186	9.1%	11.0%
APEC	164	185	212	248	286	328	373	420	3.1%	2.6%

Source: APERC Analysis (2012)

Proyeksi Permintaan Listrik Menurut Negara

Economy	Final Electricity Demand (TWh)			Average Annual Percentage Change	
	1990	2009	2035	1990-2009	2009-2035
Australia	129	214	318	2.7%	1.5%
Brunei Darussalam	1	3	4	6.3%	0.5%
Canada	418	477	701	0.7%	1.5%
Chile	15	54	128	6.8%	3.4%
China	482	3065	8765	10.2%	4.1%
Hong Kong, China	24	42	56	3.0%	1.2%
Indonesia	28	135	546	8.6%	5.5%
Japan	750	934	957	1.2%	0.1%
Korea	94	406	573	8.0%	1.3%
Malaysia	20	96	206	8.6%	3.0%
Mexico	100	201	402	3.7%	2.7%
New Zealand	28	38	50	1.6%	1.1%
Papua New Guinea	2	3	11	3.5%	5.0%
Peru	12	30	82	5.0%	4.0%
Philippines	21	51	157	4.7%	4.4%
Russia	827	686	1278	-1.0%	2.4%
Singapore	13	36	51	5.5%	1.3%
Chinese Taipei	77	202	312	5.2%	1.7%
Thailand	38	135	339	6.9%	3.6%
United States	2634	3643	4544	1.7%	0.9%
Viet Nam	6	77	385	14.2%	6.4%
APEC Total	5720	10528	19864	3.3%	2.5%

Sepanjang 2009-2035 pertumbuhan permintaan listrik Indonesia adalah 5,5 persen; level tertinggi setelah Vietnam 6,4 persen.

Electricity Ratio Menurut Negara

Economy	Percentage of Population	Percentage of Household
Australia ^a	100	100
Brunei Darussalam ^b	99.7	n/a
Canada ^a	100	100
Chile ^c	98.5	n/a
China ^c	99.4	n/a
Hong Kong, China ^a	100	100
Indonesia ^d	n/a	67.2
Japan ^a	100	100
Korea ^a	100	100
Malaysia ^c	99.4	n/a
Mexico ^e	97.3	n/a
New Zealand ^a	100	100
Papua New Guinea ^f	n/a	12.9
Peru ^c	85.7	n/a
Philippines ^g	n/a	73.7
Russia ^h	100	100
Singapore ^c	100	100
Chinese Taipei ^a	100	100
Thailand ⁱ	n/a	86.8
United States ^a	100	100
Viet Nam ^j	97.6	98.5

Rasio elektrisiti Indonesia terendah dibanding negara lain hanya 67,2 persen. Negara-negara yang memilik 100 persen rasio eletrisiti adalah Australia, Canada, Hongkong, Jepang, Korea, New Zealand, Rusia, Singapura, Taipei dan US.

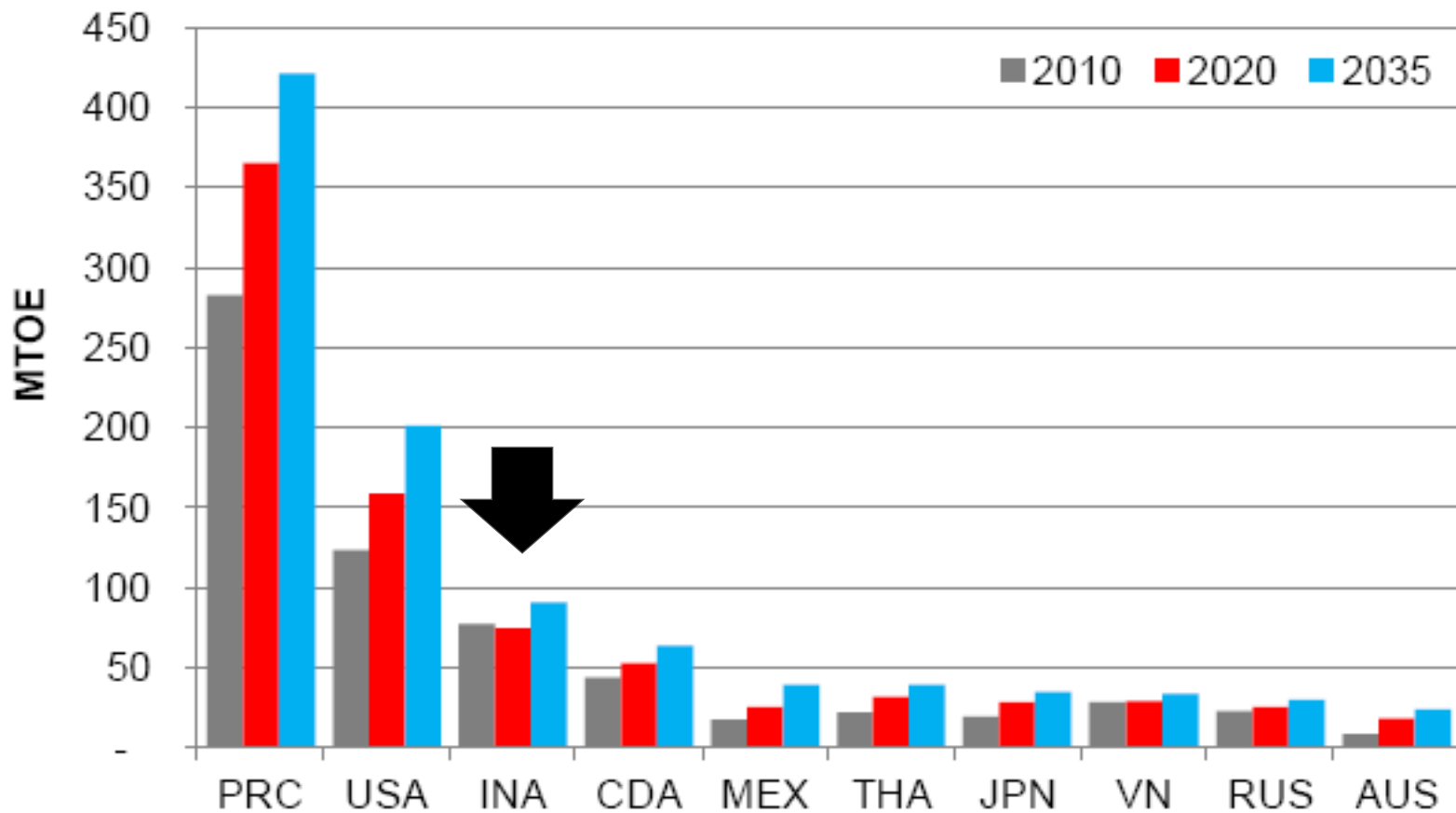
Perhitungan Biaya Subsidi Beberapa Negara

Economy	Subsidy as Percent of Full Cost of Supply	Subsidy in USD/person	Subsidy as Percent Share of GDP	Subsidy by Fuel (Billion USD/Year)			
				Oil	Gas	Coal	Electricity
Brunei Darussalam	31.9	840	2.6	0.19	0	0	0.15
China	3.8	16	0.4	7.77	0	2.01	11.54
Indonesia	23.2	66	2.3	10.15	0	0	5.79
Korea	0.4	4	0	0	0	0.18	0
Malaysia	20.0	200	2.5	3.89	0.97	0	0.81
Mexico	12.5	84	0.9	9.34	0	0	0.16
Philippines	7.3	12	0.6	1.10	0	0	0
Russian Federation	22.6	274	2.7	0	16.95	0	22.26
Chinese Taipei	1.8	25	0.1	0.24	0	0	0.34
Thailand	20.7	123	2.7	2.11	0.48	0.44	5.44
Viet Nam	14.4	33	2.8	0	0.23	0.01	2.69

Source: IEA (2012)

- ❑ Terhadap PDB, subsidi energi Indonesia mengambil porsi 2,3 persen sedangkan Brunei 2,6 persen; Malaysia 2,5 persen; Rusia 2,7 persen; Thailand 2,7 persen dan Vietnam 2,8 persen.
- ❑ Besaran subsidi per individu tertinggi adalah di Brunei USD840 per orang; disusul Rusia USD274; Malaysia dan Thailand USD200 dan USD123. Indikator ini di Indonesia mencapai USD66.

Proyeksi Penggunaan Energi Terbarukan



Source: APERC Analysis (2012)

Desakan Pemenuhan Kebutuhan Energi

- ❑ Dalam studi *Energy Management Indonesia* (2010) menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemenuhan kebutuhan energi dengan pertumbuhan ekonomi. Pada 2010, angka elastisitas energi di Indonesia mencapai 1,84. Artinya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen maka diperlukan pasokan energi harus naik 1,84 persen.
- ❑ Kondisi yang demikian menjelaskan bahwa, jika akan mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen per tahun maka dibutuhkan dukungan penyediaan energi rata-rata 14 persen per tahun.
- ❑ Elastisitas yang sama dinegara lain menunjukkan angka yang lebih rendah. Elastisitas energi Malaysia 1,69 persen; Thailand 1,16 persen; Singapura 1,1 persen; dan Jepang 0,1 persen.
- ❑ Pada beberapa negara Eropa, elastisitas energinya justru minus, artinya saat ekonomi tumbuh, laju konsumsi energinya justru menurun. Ini menunjukkan upaya konservasi dan diversifikasi energi berjalan sangat baik (Abdullah, 2010).

Ketersediaan Energi Nasional

- ❑ Indonesia saat ini telah menjadi net oil importer, meskipun untuk gas masih memiliki cadangan yang cukup untuk 50 tahun kedepan.
- ❑ Untuk itu perlu diambil perubahan kebijakan energi dari kondisi saat ini yang menekankan pada penjualan energi untuk mendapatkan devisa dan pemasukan APBN, ke arah pemenuhan energi nasional.
- ❑ Perlunya disusun energi *balance* yang komprehensif seiring target pertumbuhan ekonomi (saat ini kita belum memiliki energi *balance*).
- ❑ Perlunya diambil kebijakan merubah *energy policy* dari pemenuhan target devisa ke arah *security energy* nasional yang akan menjamin ketersediaan energi secara nasional.
- ❑ Kebijakan ini hendaknya juga didukung dengan pemberian insentif untuk energi terbarukan, yang ramah lingkungan serta pengamanan energi fosil untuk masa depan. Hal ini sekaligus mengurangi ketergantungan energi dari negara lain.

Sumber Daya Energi Primer Nasional



Relatif 'Melimpah'

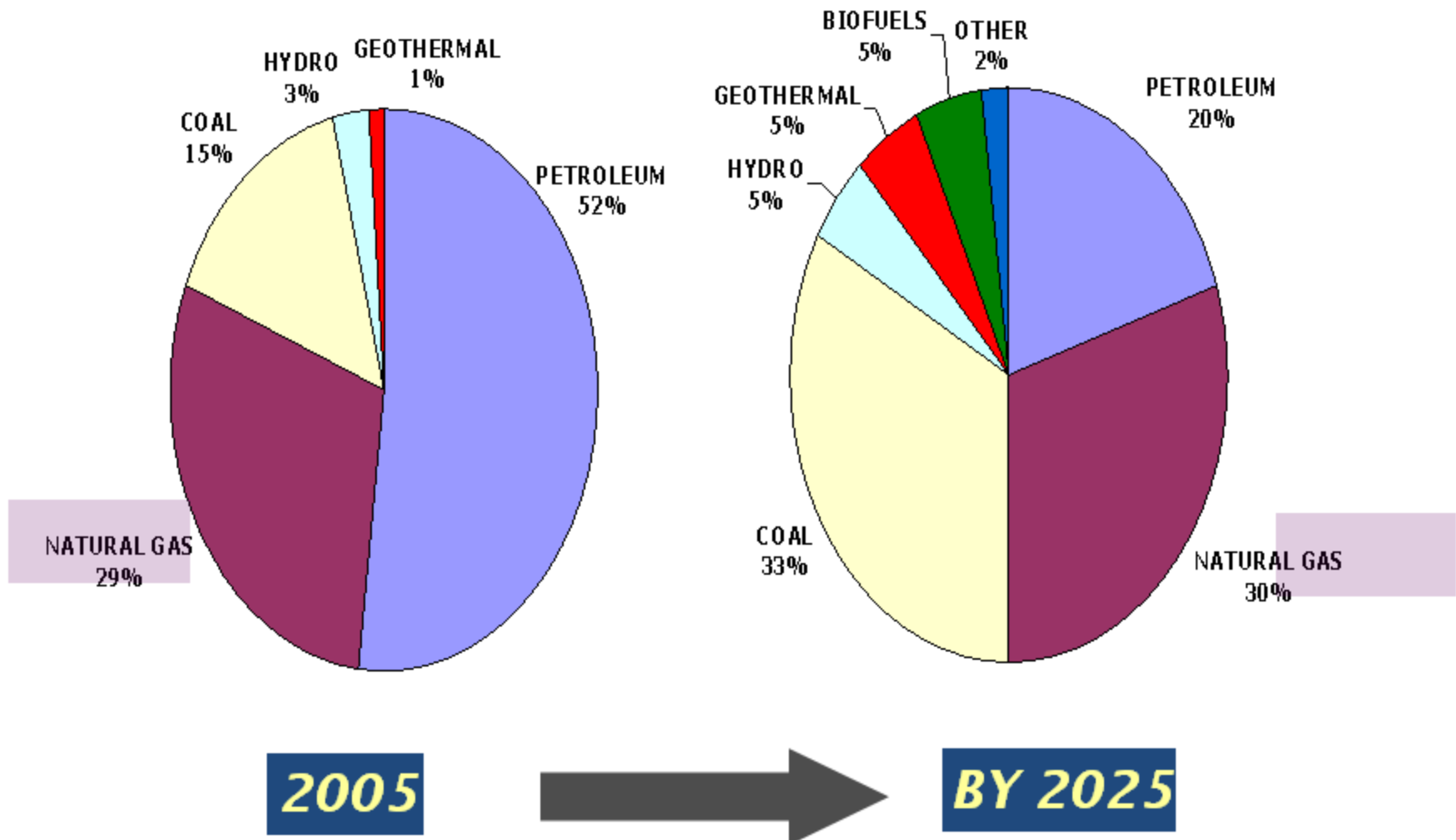
N o	ENERGI TAK TERBARUKAN	SUMBER DAYA (SD)	CADANGAN (CAD)	RASIO SD/CAD (%)	PRODUKSI (PROD)	RASIO CAD/PROD (TAHUN)*)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7 = 4/6
1	Minyak Bumi (<i>miliar barel</i>)	56.6	7.99 **)	14	0.346	23
2	Gas Bumi (TSCF)	334.5	159.64	51	2.9	55
3	Batubara (<i>miliar ton</i>)	104.8	20.98	18	0.254	83
4	Coal Bed Methane/CBM (TSCF)	453	-	-	-	-
5	Shale gas (TSCF)	574	-	-	-	-

*) Dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru; **) Termasuk Blok Cepu Sumber: Ditjen. EBTKE - 2011



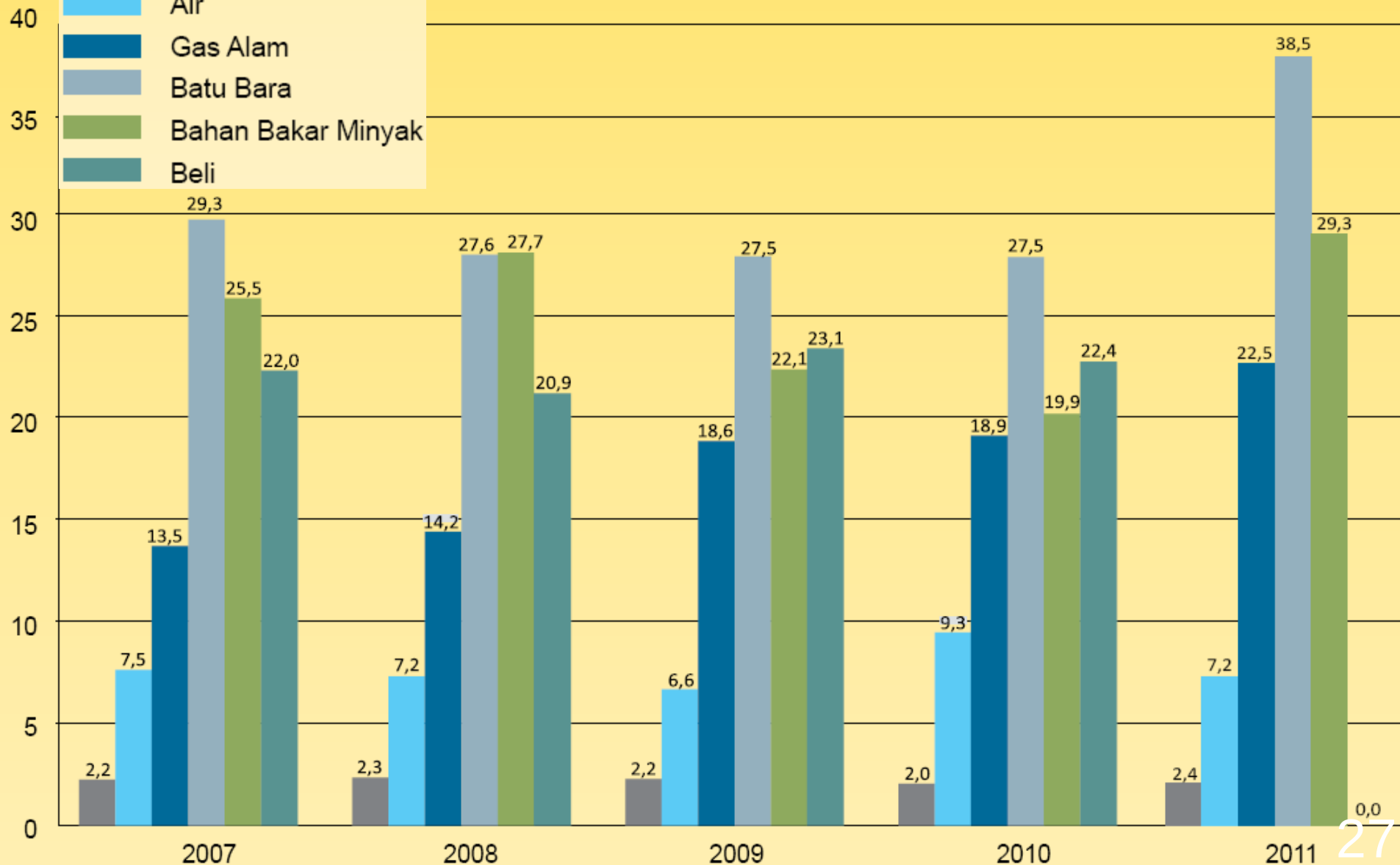
Kalau Dikelola Secara Benar: Indonesia semestinya akan Bebas Dari Ancaman Krisis Energi. Bahkan SKA Energi Fossil/Hydrocarbon ini bisa menjadi sumber pendanaan yang dahsyat bagi Pembangunan Nasional.

Sasaran Bauran Energi Primer Nasional 2025



Bauran Energi Tahun 2007-2011

(%)



Perkembangan Kebijakan Energi

1981	1987	1991	1998	2003
Kebijakan Umum Bidang Energi	Kebijakan Umum Bidang Energi	Kebijakan Umum Bidang Energi	Kebijakan Umum Bidang Energi	"Kebijakan Energi Nasional"
Kebijakan Utama 1. Intensifikasi 2. Diversifikasi 3. Konservasi 4. Indeksasi	1. Intensifikasi 2. Diversifikasi 3. Konservasi	1. Intensifikasi 2. Diversifikasi 3. Konservasi	Kebijakan Utama 1. Diversifikasi 2. Intensifikasi 3. Konservasi 4. Harga Energi 5. Lingkungan	Kebijakan 1. Intensifikasi 2. Diversifikasi 3. Konservasi
Kebijakan Penunjang 1. Penelitian dan Pengembangan 2. Industri Energi 3. Iklim Investasi Kebijakan Pemanfaatan Akhir 1. Industri 2. Transportasi 3. Rumah Tangga	Kebijakan Penunjang 1. Industri Energi 2. Iklim Investasi 3. Harga Energi Kebijakan Pemanfaatan Akhir 1. Industri 2. Transportasi 3. Rumah Tangga	Kebijakan Penunjang 1. Industri Energi 2. Iklim Investasi 3. Harga Energi Kebijakan Pemanfaatan Akhir 1. Industri 2. Transportasi 3. Rumah Tangga	Kebijakan Pendukung 1. Investasi 2. Insentif & Disinsentif 3. Standarisasi & Sertifikasi 4. Pengembangan Infrastruktur 5. Peningkatan Kualitas SDM 6. Sistem Informasi 7. Penelitian dan Pengembangan 8. Kelembagaan 9. Pengaturan	Kebijakan Pendukung: 1. Infrastruktur 2. Penetapan mekanisme harga keekonomian 3. Perlindungan kaum <i>dhuafa</i> 4. Lingkungan 5. Kemitraan Pemerintah dan swasta 6. Pemberdayaan masyarakat 7. Litbang dan diklat 8. Koordinasi untuk optimalisasi energi mix

Mengukur Peranan Listrik Bagi Perekonomian

Elastisitas Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(10 persen Pertumbuhan Stok)

Lokasi	Jalan	Listrik	Telekomu- nikasi	Air	Pelabuhan	Irigasi
Nasional	0,884	0,839	0,610	0,220	0,259	1,264
Sumatera	0,143	0,119	0,092	0,043	0,087	0,374
Jawa Bali	0,590	0,641	0,437	0,149	0,104	0,541
Kalimantan	0,044	0,032	0,027	0,011	0,041	0,070
Sulawesi	0,039	0,036	0,023	0,013	0,014	0,155

Sumber: Studi LPEM-UI (Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi), 2005

*Semakin tinggi nilai elastisitas, semakin krusial

Target Rasio Elektrifikasi

No.	PROVINSI	2012	2017	2022	2027	2031
1.	Aceh	89,79	97,24	99,99	100,00	100,00
2.	Sumatera Utara	87,01	95,85	99,99	100,00	100,00
3.	Sumatera Barat	80,19	92,44	99,99	100,00	100,00
4.	Riau	79,09	91,89	99,99	100,00	100,00
5.	Kepulauan Riau ^{*)}	91,68	98,19	99,99	100,00	100,00
6.	Sumatera Selatan	74,83	88,96	99,99	100,00	100,00
7.	Jambi	78,17	91,43	99,99	100,00	100,00
8.	Bengkulu	73,23	89,76	99,99	100,00	100,00
9.	Lampung	72,88	94,04	99,99	100,00	100,00
10.	Kepulauan Bangka Belitung	83,39	88,79	99,99	100,00	100,00
11.	Bali	71,56	87,35	100,00	100,00	100,00
12.	Jawa Timur	74,98	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	Jawa Tengah	80,74	88,97	100,00	100,00	100,00
14.	D.I Yogyakarta	77,96	92,95	100,00	100,00	100,00
15.	Jawa Barat	72,77	91,56	100,00	100,00	100,00
16.	Banten	69,53	90,07	100,00	100,00	100,00
17.	DKI Jakarta	99,99	88,36	100,00	100,00	100,00
18.	Kalimantan Timur	64,02	86,28	99,99	100,00	100,00
19.	Kalimantan Selatan	77,70	86,95	99,99	100,00	100,00
20.	Kalimantan Tengah	69,20	91,20	99,99	100,00	100,00
21.	Kalimantan Barat	67,87	84,36	99,99	100,00	100,00
22.	Sulawesi Utara	75,68	87,69	95,91	98,18	100,00
23.	Sulawesi Tengah	66,60	80,29	99,99	100,00	100,00
24.	Gorontalo	55,88	83,15	95,91	98,18	100,00
25.	Sulawesi Selatan	76,86	84,98	99,99	100,00	100,00
26.	Sulawesi Tenggara	57,90	90,78	99,99	100,00	100,00
27.	Sulawesi Barat	65,26	78,80	95,91	98,18	100,00
28.	Nusa Tenggara Barat	54,77	74,74	91,82	96,36	100,00
29.	Nusa Tenggara Timur	44,49	69,60	91,82	96,36	100,00
30.	Maluku	72,01	83,36	91,82	96,36	100,00
31.	Maluku Utara	71,68	83,19	91,82	96,36	100,00
32.	Papua dan Papua Barat	40,84	67,77	91,82	96,36	100,00
	Indonesia	75,30	86,37	99,33	99,69	100,00

^{*)} Rasio elektrifikasi tinggi karena termasuk wilayah Batam.

Proyeksi Elastisitas Listrik Tahun 2010-2019

Tahun	Jawa Bali	Indonesia Timur dan Indonesia Barat	Indonesia
2010	1,27	1,74	1,38
2011	1,39	1,72	1,48
2012	1,47	1,78	1,55
2013	1,48	1,73	1,55
2014	1,49	1,61	1,53
2015	1,48	1,59	1,52
2016	1,51	1,56	1,51
2017	1,50	1,56	1,51
2018	1,49	1,53	1,49
2019	1,46	1,53	1,46

Proyeksi Rasio Elektrifikasi

Tahun	Penduduk Juta	Pelanggan Juta	Rasio Elek. %
2010	235,5	42,1	66,1
2011	238,2	44,3	68,5
2012	240,8	46,7	71,1
2013	243,3	49,1	73,7
2014	245,9	51,7	76,5
2015	248,3	54,5	79,5
2016	250,7	57,3	82,5
2017	253,1	60,3	85,5
2018	255,5	63,3	88,5
2019	257,7	66,0	90,9

Sumber: Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik, 2010-2019

PLN menjelaskan bahwa setelah 2014, elastisitas total Indonesia diprediksi menurun karena semakin banyak konsumen listrik yang menggunakan peralatan dengan teknologi yang lebih efisien, terutama pada sektor industri, bisnis dan publik.

Sementara itu rasio elektrifikasi listrik mencapai 90,9 persen pada 2019 naik dari 66,1 persen pada 2010.

Target Pertumbuhan Listrik & Rasio Elektrifikasi

Prakiraan Kebutuhan Listrik, Angka Pertumbuhan dan Rasio Elektrifikasi

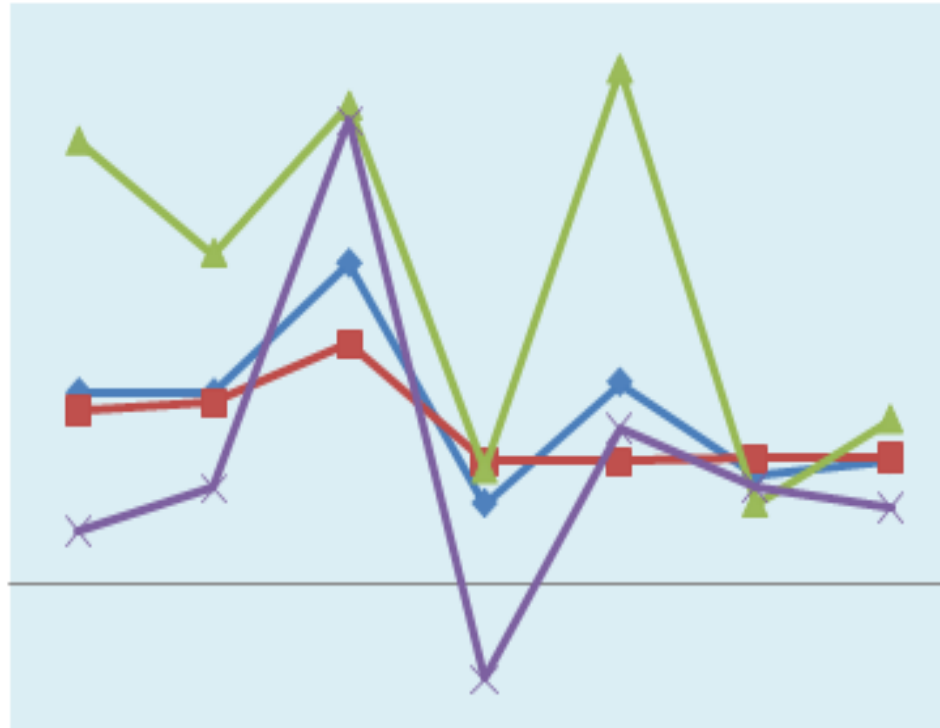
Keterangan	2010	2011	2013	2015	2017	2019
1. Energy Demand (TWh)						
Indonesia	147,1	160,5	192,7	230,8	275,3	327,3
Jawa-Bali	115,1	125,2	149,6	179,0	213,0	252,5
Indonesia Timur	11,3	12,6	15,8	19,1	23,2	28,1
Indonesia Barat	21,4	23,3	28,1	35,5	44,5	53,8
2. Pertumbuhan Penyediaan Listrik (%)						
Indonesia	8,1	9,1	9,6	9,4	9,2	9,0
Jawa-Bali	7,6	8,8	9,4	9,4	9,1	8,8
Indonesia Timur	15,9	13,3	13,1	10,5	10,6	8,5
Indonesia Barat	5,1	8,9	10,4	12,5	11,4	9,3
3. Rasio Elektrifikasi (%)						
Indonesia	66,1	68,5	73,7	79,5	85,5	90,9
Jawa-Bali	72,2	74,8	80,5	86,9	93,3	98,2
Indonesia Timur	48,5	50,5	55,1	60,2	66,0	72,6
Indonesia Barat	64,3	66,3	71,3	80,5	90,4	98,0

- ◎ Rasio elektrifikasi pada 2015 diharapkan meningkat menjadi 79,5 persen dengan fokus memacu pertumbuhan listrik di wilayah Indonesia Timur.

Sumber: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2010-2019 PLN

Listrik dan Dekomposisi Inflasi

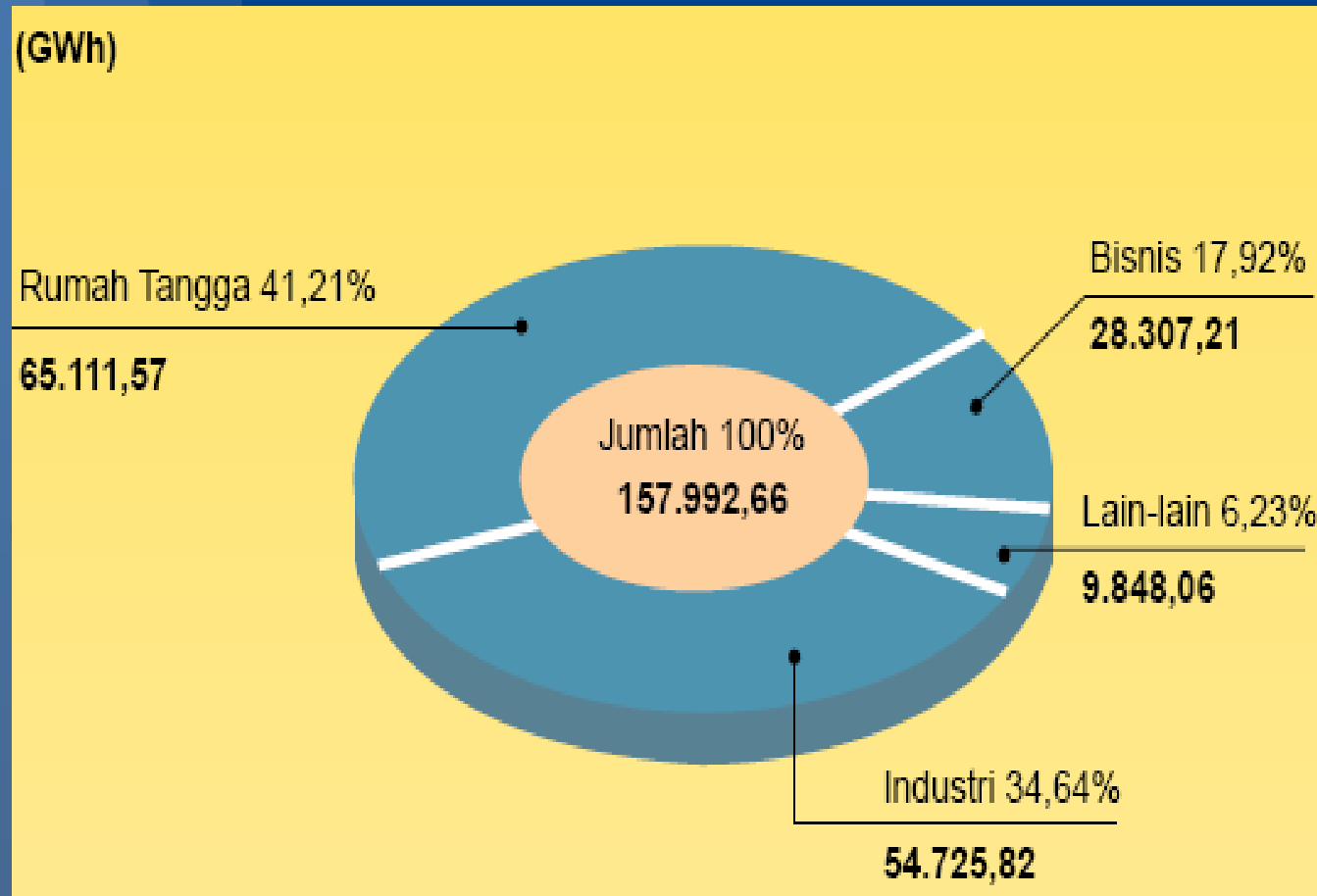
Perkembangan Dekomposisi Inflasi Sepanjang 2006-2012



Inflasi diatur pemerintah sepanjang 2006-2012 relatif rendah; hanya pada 2008 yang menembus level 15,99% karena kenaikan harga BBM.

◆ Inflasi IHK	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
■ Inflasi Inti	6,6	6,59	11,06	2,78	6,96	3,79	4,3
▲ Bergejolak	6,03	6,29	8,29	4,28	4,28	4,34	4,4
✕ Diatur Pemerintah	15,27	11,41	16,48	3,95	17,74	2,78	5,68
	1,84	3,3	15,99	-3,26	5,4	3,37	2,66

Energi Terjual per Kelompok Pelanggan (2011)



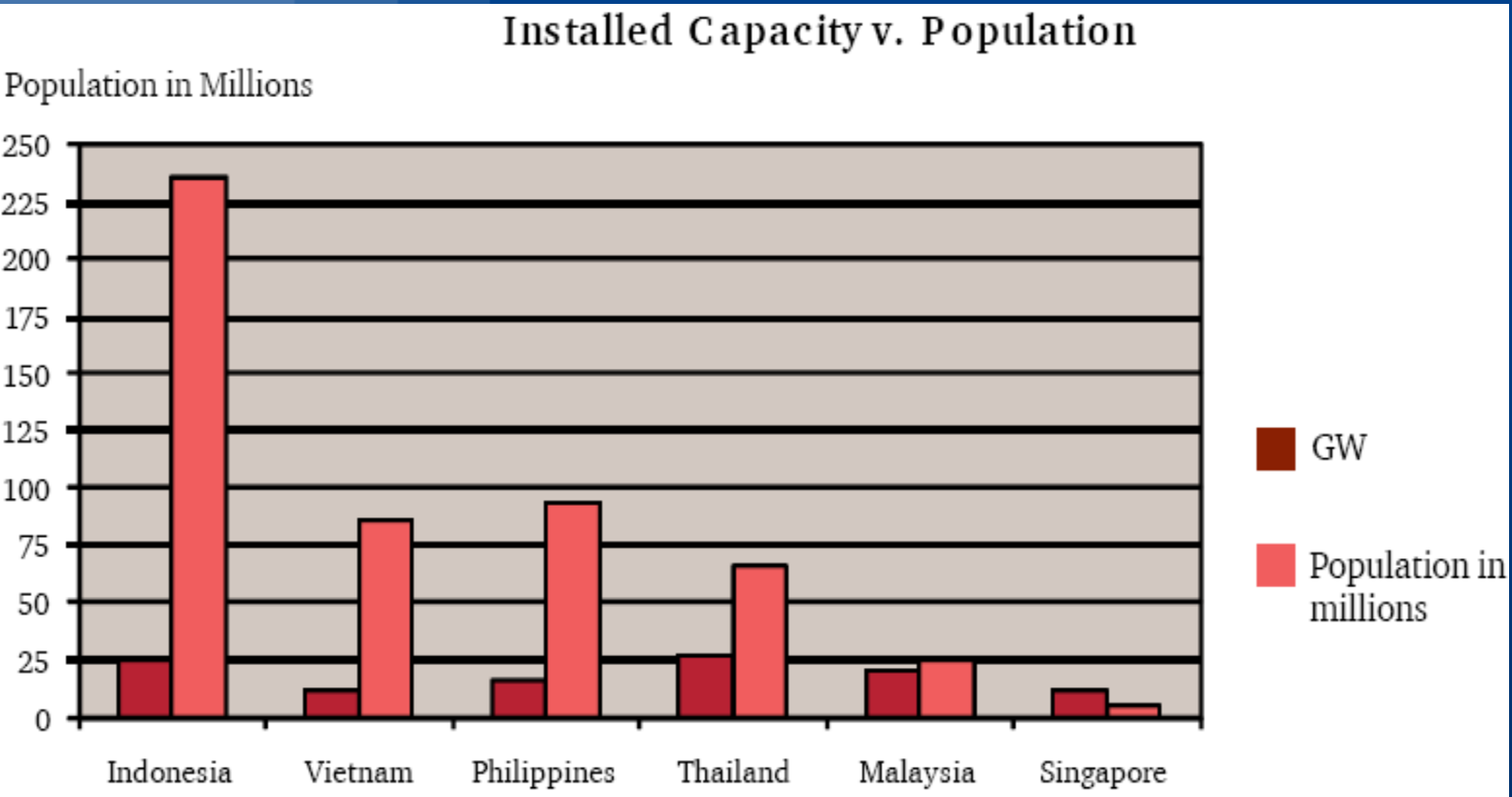
Jumlah Pelanggan per Kelompok Pelanggan

T a h u n	Rumah Tangga	Industri	Bisnis	Sosial	Gdg. Kantor Pemerintah	Penerangan Jalan Umum	Jumlah	Δ%
2003	29.997.554	46.818	1.310.686	659.034	83.810	53.514	32.151.416	3,87
2004	31.095.970	46.520	1.382.416	686.851	87.187	67.502	33.366.446	3,78
2005	32.174.922	46.475	1.455.797	716.194	89.533	76.432	34.559.353	3,58
2006	33.118.262	46.366	1.655.325	748.558	92.395	90.318	35.751.224	3,45
2007	34.684.540	46.818	1.610.574	790.781	97.886	103.130	37.333.729	4,43
2008	36.025.071	47.536	1.716.046	838.129	103.821	113.483	38.844.086	4,05
2009	37.099.830	47.900	1.879.429	861.067	114.971	114.488	40.117.685	3,28
2010	39.324.520	48.675	1.912.150	909.312	113.676	127.054	42.435.387	5,78
2011	42.577.542	50.365	2.049.361	963.766	120.246	133.865	45.895.145	8,15

Laju Pertumbuhan Rata-rata Jumlah Pelanggan per Tahun (%)

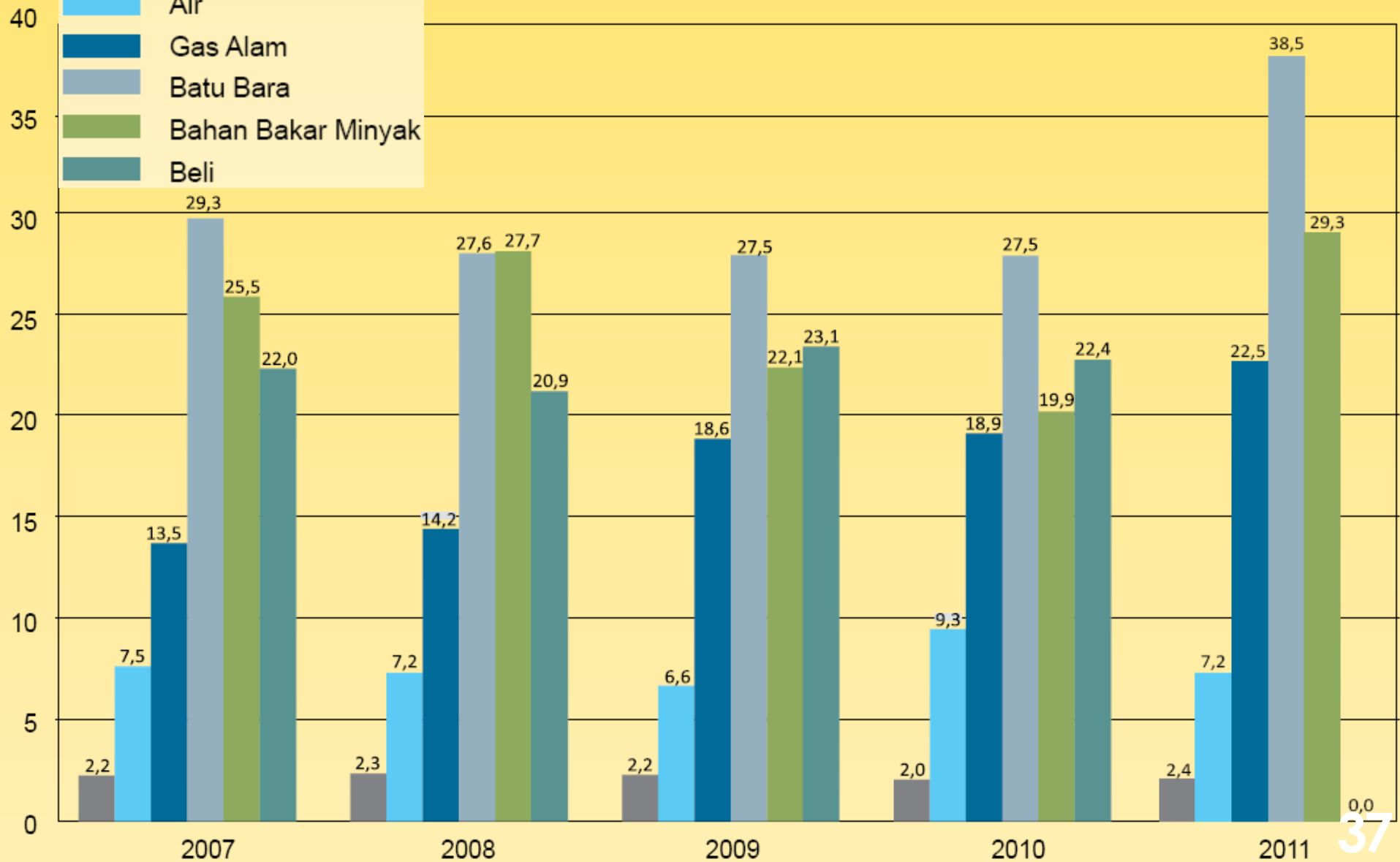
Jenis Pelanggan	REPELITA I	REPELITA II	REPELITA III	REPELITA IV	REPELITA V	REPELITA VI *)	2000 - 2011
- Rumah Tangga	3,05	11,64	20,62	16,45	8,00	10,97	4,30
- Industri	(0,55)	2,51	15,85	10,47	4,20	1,62	1,17
- Bisnis	7,17	13,27	10,45	8,33	6,53	11,89	6,15
- Lain-lain	10,75	6,28	18,21	16,93	10,36	8,94	5,28
Jumlah	3,51	11,56	19,83	16,05	8,00	10,93	4,33

Perbandingan Kapasitas Instal dan Populasi



Bauran Energi Tahun 2007-2011

(%)



Tujuan Subsidi Listrik

▲ Beberapa tujuan subsidi listrik adalah sebagai berikut:

- ❑ Subsidi listrik dialokasikan karena rata-rata harga jual tenaga listrik (lebih rendah dari biaya pokok penyediaan/BPP) tenaga listrik pada golongan tarif tersebut.
- ❑ Anggaran subsidi listrik juga dialokasikan untuk mendukung ketersediaan listrik bagi industri, komersial, dan pelayanan masyarakat.
- ❑ Pemberian subsidi listrik diharapkan dapat menjamin program investasi dan rehabilitasi sarana/prasarana dalam penyediaan tenaga listrik.

Upaya Pemerintah Menekan Biaya Pokok Penyediaan/BPP

- ▲ Pemerintah dan PLN melakukan beberapa langkah untuk menekan BPP tenaga listrik yaitu:
 - ❑ Program penurunan susut jaringan (losses)
 - ❑ Program diversifikasi energi primer di pembangkit listrik dengan melakukan optimalisasi penggunaan gas, panas bumi, batubara, biodiesel, dan penggantian high speed diesel (HSD) menjadi marine fuel oil (mfo).
 - ❑ Peningkatan penggunaan batubara, pemanfaatan biofuel dan panas bumi.
 - ❑ Dari sisi internal pemerintah juga mengupayakan pembenahan pada PT PLN agar tidak mengalami kesulitan likuiditas dan pendanaan. Langkah tersebut dilakukan pemerintah dengan memberikan margin usaha 7 persen kepada PLN.

Perkembangan Realisasi Subsidi Listrik

- ▲ Sepanjang 2007-2012, realisasi belanja subsidi listrik secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp31,9 triliun (naik rata-rata 14,5 persen per tahun). Jumlah tersebut mencakup 0,8 persen dari PDB.

❑ Beberapa faktor yang memengaruhi realisasi tersebut adalah

- ▲ naiknya BPP tenaga listrik sebagai dampak dari masih dominannya penggunaan BBM dalam sistem pembangkit listrik nasional;
- ▲ perubahan kurs dan ICP; dan
- ▲ semakin meningkatnya penjualan tenaga listrik yang mencapai 167,2 tera watt hour (TWh) pada 2012, dibandingkan penjualan tenaga listrik dalam tahun 2007 sebesar 119,0 TWh

Indikator Kelistrikan APBN-P 2012 dan RAPBN 2013

No	PARAMETER	2012 APBNP	2013 RAPBN
1	ICP (US\$/bbl)	105,0	100,0
2	Kurs (Rp/US\$)	9.000,0	9.300,0
3	TTL (%)	-	15,0
4	Growth Sales (%)	7,0	9,0
5	Energy sales (TWh)	167,2	182,3
6	Losses (%)	8,50%	8,50%
7	Fuel Mix		
	- High Speed Diesel/HSD (juta KL)	5,5	4,3
	- IDO (juta KL)		1,4
	- Marine Fuel Oil/MFO (juta KL)	1,7	-
	- Batu Bara (juta ton)	38,1	48,8
	- Gas (juta BBTU)	0,3	0,4
	- Panas Bumi (TWh)	3,4	4,2
	- Bio Diesel (juta KL)	0,01	0,01
8	Margin (%)	7%	7%
Subsidi Tahun Berjalan (Miliar Rp)		60.466,6	78.627,1
Kekurangan tahun sebelumnya (miliar Rp)		4.506,8	7.310,7
Subsidi (accrued dan kas) (Miliar Rp)		64.973,4	85.937,8
<i>Carry over</i> ke Tahun berikutnya			(5.000,0)
TOTAL SUBSIDI (Miliar Rp)		64.973,4	80.937,8

Asumsi penyusunan beban subsidi listrik 2013 yaitu:

- ICP sebesar USD100,00 per barel;
- nilai tukar rupiah sebesar Rp9.300,0 per dolar Amerika Serikat;
- Penyesuaian rata-rata tarif tenaga listrik sekitar 15 persen;
- margin usaha PT PLN sebesar 7 persen;
- meningkatkan penjualan tenaga listrik; dan (6) susut jaringan (losses) sebesar 8,5 persen.
- subsidi listrik dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp80,9 triliun (0,9 persen terhadap PDB)

Sumber: Kementerian Keuangan

Perkembangan Indikator Kelistrikan Nasional

No	PARAMETER	2007	2008	2009	2010	2011	2012 APBNP
1	ICP (US\$/bbl)	78,0	96,8	61,5	79,4	111,5	105,0
2	Kurs (Rp/US\$)	9.419,0	10.950,0	10.408,0	9.087,0	8.776,0	9.000,0
3	TTL (%)	-	-	-	10	-	-
4	Growth Sales (%)	5,7	3,8	4,3	9,4	4,1	7,0
	Energy sales (TWh)	119,0	124,3	134,9	145,7	151,7	167,2
5	Losses (%)	11,11	10,45	9,96	9,74	9,44	8,5
6	Fuel Mix						
	- High Speed Diesel/HSD (juta KL)	7,9	8,1	6,3	6,9	8,0	5,5
	- IDO (juta KL)	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	-
	- Marine Fuel Oil/MFO (juta KL)	2,8	3,2	3,3	2,43	2,5	1,7
	- Batu Bara (juta ton)	21,5	21,0	21,6	23,96	29,1	38,1
	- Gas (juta BBTU)	0,2	0,2	0,3	0,28	0,3	0,3
	- Panas Bumi (TWh)	3,2	3,4	3,5	3,40	3,4	3,4
	- Bio Diesel (juta KL)	-	-	-	-	-	0,01
7	Margin (%)	-	-	5%	8%	8%	7%
Subsidi Tahun Berjalan (Miliar Rp)		33.073,5	80.395,6	45.139,3	53.601,6	92.867,0	60.466,6
Kekurangan tahun sebelumnya (miliar Rp)		-	3.510,9	4.407,1	4.000,0	4.580,5	4.506,8
Subsidi (accrued dan kas) (Miliar Rp)		33.073,5	83.906,5	49.546,5	57.601,6	97.447,5	64.973,4
Carry over ke Tahun berikutnya		-	-	-	-	(7.000,0)	
TOTAL SUBSIDI (Miliar Rp)		33.073,5	83.906,5	49.546,5	57.601,6	90.447,5	64.973,4

Sumber: Kementerian Keuangan

Perkembangan Subsidi Energi dan Non Energi

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012 APBNP
A. ENERGI	116.865,9	223.013,2	94.585,9	139.952,9	255.608,8	202.353,2
- BBM	83.792,3	139.106,7	45.039,4	82.351,3	165.161,3	137.379,8
- Listrik	33.073,5	83.906,5	49.546,5	57.601,6	90.447,5	64.973,4
B. NON ENERGI	33.348,6	52.278,2	43.496,3	52.754,1	39.749,4	42.723,1
- Pangan	6.584,3	12.095,9	12.987,0	15.153,8	16.539,3	20.926,3
- Pupuk	6.260,5	15.181,5	18.329,0	18.410,9	16.344,6	13.958,6
- Benih	479,0	985,2	1.597,2	2.177,5	96,9	129,5
- PSO	1.025,0	1.729,1	1.339,4	1.373,9	1.833,9	2.151,4
- Bunga Kredit Program	347,5	939,3	1.070,0	823,0	1.522,9	1.293,9
- Minyak Goreng	24,6	103,3	-	-	-	-
- Kedelai	-	225,7	-	-	-	-
- DTP	17.113,6	21.018,2	8.173,6	14.815,1	3.411,8	4.263,4
- Subsidi Lainnya	1.514,0	-	-	-	-	-
TOTAL	150.214,5	275.291,4	138.082,2	192.707,1	295.358,2	245.076,3

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada 2013, rincian subsidi energi dan energi adalah sebagai berikut:

1. subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun, yaitu subsidi BBM sebesar Rp193,8 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp80,9 triliun.
2. Subsidi non energi adalah Rp41,4triliun yang meliputi: (1) subsidi pangan sebesar Rp17,2 triliun; (2) subsidi pupuk sebesar Rp15,9 triliun; (3) subsidi benih sebesar Rp0,1 triliun; (4) subsidi PSO sebesar Rp2,0 triliun; (5) subsidi bunga kredit program sebesar Rp1,2 triliun; dan (6) subsidi pajak sebesar Rp4,8 triliun.

Perkembangan Alokasi Dana Penjaminan Pemerintah

Penjaminan	2008	2009	2010	2011	2012
1. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara oleh PT PLN (Persero)	283,0	1.000,0	1.000,0	889,0	623,3
2. Percepatan Penyediaan Air Minum oleh PDAM	-	-	50,0	15,0	10,0
Total	283,0	1.000,0	1.050,0	904,0	633,3

Sumber: Kementerian Keuangan

Kewajiban Penjaminan Pemerintah 2012-2013 (Miliar Rupiah)

Penjaminan	Kegiatan	Dasar Pengaturan	APBNP 2012	RAPBN 2013
1. PT. PLN (Persero)	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batu Bara untuk Proyek 10.000 MW Tahap I	Perpres No.86 tahun 2006	623,3	611,2
2. PDAM	Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum	Perpres No.29 tahun 2009	10,0	35,0
3. KPS dalam Pembangunan Infrastruktur	PLTU Jawa Tengah	Perpres No.78 tahun 2010	0,0	59,8
Total			633,3	706,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Kebutuhan Investasi Listrik

Item		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Pembangkit	Fc	2,150.5	2,142.6	2,467.0	2,086.6	1,694.6	1,692.6	2,485.8	2,988.9	3,074.7	3,226.1	24,009.2
	Lc	1,015.8	1,087.9	1,018.0	852.0	769.2	952.7	1,317.2	1,276.8	1,234.7	1,484.0	11,008.4
	Total	3,166.3	3,230.5	3,485.0	2,938.6	2,463.8	2,645.3	3,803.0	4,265.7	4,309.4	4,710.2	35,017.7
Penyaluran	Fc	1,384.5	1,498.9	1,136.0	1,112.6	1,351.1	1,758.4	1,045.0	778.7	632.3	611.3	11,308.6
	Lc	603.3	547.0	441.0	397.1	485.0	480.5	265.2	192.3	245.7	229.4	3,886.6
	Total	1,987.7	2,045.9	1,577.0	1,509.7	1,836.1	2,239.0	1,310.1	971.0	878.0	840.7	15,195.2
Distribusi	Fc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lc	781.2	1,087.4	1,014.0	956.0	999.9	1,183.6	1,210.5	1,330.1	1,371.7	1,340.3	11,274.7
	Total	781.2	1,087.4	1,014.0	956.0	999.9	1,183.6	1,210.5	1,330.1	1,371.7	1,340.3	11,274.7
Total	Fc	3,534.9	3,641.5	3,603.0	3,199.1	3,045.7	3,451.0	3,530.7	3,767.5	3,706.9	3,837.4	35,317.8
	Lc	2,400.3	2,722.3	2,473.0	2,205.2	2,254.1	2,616.9	2,792.9	2,799.2	2,852.1	3,053.8	26,169.7
	Total	5,935.2	6,363.7	6,076.0	5,404.3	5,299.8	6,067.9	6,323.6	6,566.7	6,559.1	6,891.2	61,487.6

Sumber: Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik, 2010-2019

- ❑ Kebutuhan investasi pembangkit, penyaluran dan distribusi selama periode 2010 – 2019 untuk memenuhi kebutuhan sarana kelistrikan di Indonesia secara keseluruhan adalah sebesar US\$ 97,1 milyar.
- ❑ Terdiri dari investasi pembangkit (termasuk IPP) sebesar US\$ 70,6 milyar, investasi penyaluran sebesar US\$ 15,2 milyar dan investasi distribusi sebesar US\$ 11,3 milyar.

Realisasi PMDN Industri Kertas

	2010		2011		2012		2013:Sampai QIII	
	Investasi*	(%)	Investasi*	(%)	Investasi*	(%)	Investasi*	(%)
SEKTOR PRIMER	12,131.40	20.01	16306.9	21.46	20369.10	22.10	15319.645	16.28
SEKTOR SEKUNDER	25,612.60	42.25	39048	51.38	49888.94	54.12	38288.379	40.68
SEKTOR TERSIER	22,882.20	37.74	20645.7	27.17	21923.97	23.78	40504.5428	43.04
Listrik, Gas dan Air	4,929.80	8.13	9134.7	12.02	3796.78	4.12	20374.8869	21.65
Total	60,626.20	100.00	76,000.60	100.00	92,182.01	100.00	94,112.57	100.00

* Rupiah Miliar; ** Persen

Sumber: BKPM, 2013, telah diolah kembali

Realisasi PMA Industri Kertas

	2010		2011		2012		2013:Sampai QIII	
	Investasi*	(%)	Investasi*	(%)	Investasi*	(%)	Investasi*	(%)
SEKTOR PRIMER	3,042.30	18.76	4870.3	25.01	5,933.07	24.15	5093.41	24.02
SEKTOR SEKUNDER	3,357.10	20.70	6779.5	34.81	11,769.95	47.91	12428.56	58.62
SEKTOR TERSIER	9,815.30	60.53	7824.9	40.18	6,861.65	27.93	3680.77	17.36
Listrik, Gas dan Air	1,428.40	8.81	1864.7	9.57	1,514.57	6.17	756.92	3.57
Total	16,214.70	100.00	19,474.70	100.00	24,564.67	100.00	21,202.74	

* USD Juta; ** Persen

Sumber: BKPM, 2013, telah diolah kembali

Model Investasi Listrik di Negara Lain

1. Model Monopoli Pemerintah

1. Pemerintah memproduksi listrik dan menjualnya ke masyarakat (rumah tangga, dunia usaha, dan sektor lainnya). Pemerintah menjalankan public service obligation.
2. Pemerintah biasanya mengeluarkan subsidi karena menjual listrik di bawah harga ekonominya.

2. Model Melibatkan Swasta (*Private Public Partnership*)

1. Kaijan International Energy Agency (2003) menyimpulkan perlunya mengurangi monopoli pemerintah dalam penyediaan listrik (melibatkan swasta). Hal ini telah dilaksanakan oleh negara-negara OECD.
2. Selain alasan keterbatasan dana pemerintah juga dipengaruhi oleh efektivitas dan efisiensi.
3. Syaratnya adalah harus didukung oleh iklim investasi kondusif.
4. Meski demikian pemerintah harus menetapkan harga maksimal (price floor) untuk melindungi konsumen
5. Pemerintah harus mewajibkan adanya transfer teknologi.

Model Investasi Listrik di Negara Lain

3. Model Alternatif (tukar guling)

- Misalnya, untuk dapat berinvestasi pada sektor tertentu, investor diwajibkan berinvestasi listrik (minimal menyeter modal). Insentif dapat diberikan baik untuk ukuran fiskal maupun nonfiskal.

Lampiran

Studi Pengaruh Kenaikan Tarif Listrik Terhadap Inflasi

Studi yang dilakukan oleh Pri Agung dan Komaidi (2010) menjelaskan pengaruh kenaikan TDL terhadap inflasi melalui jalur biaya produksi.

No	Sektor	Porsi Biaya Listrik Terhadap Total Biaya (%)	Tambahan Biaya Produksi		
			TDL 10 %	TDL 15 %	TDL 20 %
1	Tekstil	8.78	0.88%	1.32%	1.76%
2	Barang Elektronik, Komunikasi, dan Perlengkapannya	11.20	1.12%	1.68%	2.24%
3	Barang-Barang Kosmetik	13.23	1.32%	1.98%	2.65%
4	Perabot rumah tangga dan kantor dari logam	16.49	1.65%	2.47%	3.30%
5	Pakaian jadi	19.10	1.91%	2.87%	3.82%
6	Perabot rumah tangga dari kayu, bambu, dan rotan	24.38	2.44%	3.66%	4.88%
7	Jasa perorangan dan rumah tangga	26.57	2.66%	3.99%	5.31%
8	Barang-barang rajutan	27.18	2.72%	4.08%	5.44%
9	Jasa angkutan kereta api	29.21	2.92%	4.38%	5.84%
10	Alas kaki	36.55	3.66%	5.48%	7.31%
Rata-rata			2.13%	3.19%	4.25%

Sumber: Pri Agung dan Komaidi, 2010

- ❑ Studi ini menyimpulkan bahwa kenaikan TDL masing-masing sebesar 10 persen; 15 persen; dan 20 persen akan menambah biaya produksi masing-masing sebesar 2,13 persen; 3,19 persen; dan 4,25 persen.
- ❑ Kondisi yang demikian menjelaskan bahwa upaya memperoleh keuntungan yang sama (sebelum kenaikan TDL) akan direspons dengan menaikkan harga jual produk paling tidak masing-masing sebesar 2,13 persen; 3,19 persen; dan 4,25 persen.

Kenaikan TDL dan Inflasi

- Merujuk pada hasil studi yang sama, kenaikan TDL pada kisaran 10 persen hingga 20 persen akan berpengaruh pada kenaikan inflasi. Namun akan terlihat pengaruh yang berbeda, tergantung model yang digunakan. Studi tersebut menjelaskan bahwa, kenaikan TDL 10 persen hingga 20 persen, melalui model FSAM (asumsi ada penurunan konsumsi Isirtik dan barang dan jasa jika TDL naik) akan menyebabkan naiknya inflasi pada kisaran 0,63 persen hingga 0,70 persen.

Indikator	Dampak/Tambahan Inflasi (%)	
	FSAM Model	WAP Model
Kenaikan TDL 10 %	0.63	0.68
Kenaikan TDL 15 %	0.67	1.02
Kenaikan TDL 20 %	0.70	1.36

- Sementara jika menggunakan menggunakan WAP model (asumsi tidak terdapat pergeseran pola konsumsi) maka kenaikan TDL 10 persen hingga 20 persen akan menyebabkan naiknya inflasi sekitar 0,68 persen hingga 1,36 persen.

Kenaikan TDL dan Tenaga Kerja

- Kenaikan TDL pada gilirannya memangkas tenaga kerja. Merujuk pada penelitian Pri Agung dan Komaidi (2010) kenaikan TDL pada kisaran 10 persen hingga 20 persen akan menyebabkan menurunnya konsumsi listrik industri 6,7 persen hingga 13,40 persen.

Indikator Kebijakan	Dampak Kebijakan (%)	
	Konsumsi Listrik Industri	Permintaan Tenaga Kerja
Kenaikan TDL 10 %	- 6.70	-1.17
Kenaikan TDL 15 %	-10.05	-1.76
Kenaikan TDL 20 %	-13.40	-2.35

- Terhadap kondisi tenaga kerja, kenaikan TDL pada level 10 persen hingga 20 persen berdampak pada menyusutan penggunaan tenaga kerja 1,17 persen hingga 2,35 persen.

Sekian dan Terima Kasih